

**Judul** : Rekrutmen Perempuan Jangan Cuma Basa Basa: Kesetaraan Gender di Politik  
**Tanggal** : Selasa, 11 Juli 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Kesetaraan Gender Di Politik Rekrutmen Perempuan Jangan Cuma Basa-basi



Putu Supadma Rudana

PARLEMEN Indonesia dan parlemen di negara-negara ASEAN masih mengalami ketertinggalan dalam hal kesetaraan gender dibanding negara-negara lain di dunia. Di negara-negara Afrika, anggota parlemennya lebih banyak diisi perempuan.

Fakta ini diungkap Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat (7/7).

Atas kondisi ini, Putu meminta Sidang WAIPA mendorong parlemen ASEAN menciptakan kebijakan afirmatif yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen.

"Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)

sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujar Putu dalam keterangannya, kemarin.

Menurut dia, meningkatkan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan. Laki-laki juga harus turut membantu. Hal konkret yang perlu dilakukan, yakni harus ada kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang maksimal di politik.

"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan, bukan sekadar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," ucapnya legislator asal Bali ini.

Dia menerangkan, dalam pemilu partai politik bisa menempatkan perempuan di nomor urut atas atau juga dengan sistem selang-seling. Jika laki-laki di nomor 1, perempuan bisa di nomor 2, dan seterusnya. Bisa juga sebaliknya.

"Sudah saatnya konstitusi kita ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan," ucapnya.

Menurut Putu, pemberian kesempatan bagi perempuan juga perlu dilakukan di pemilihan eksekutif. Misalnya, dalam Pilpres, bila capresnya laki-laki, cawapresnya bisa perempuan. Demikian pula untuk Pilkada di berbagai daerah. ■ USU